

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang penelitian

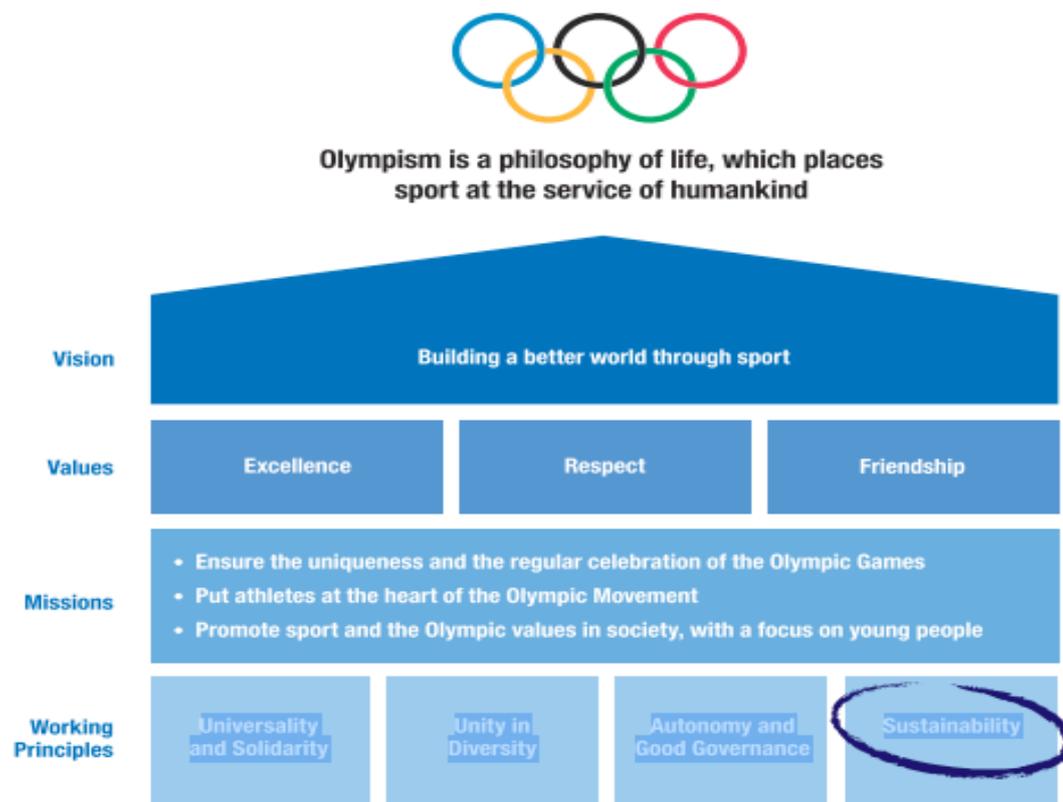
Kecenderungan pemerintah suatu negara memberikan investasi yang besar dalam olahraga elit menggunakan argumen bahwa kesuksesan atlet elit dan menjadi tuan rumah gelaran olahraga internasional menghasilkan banyak hal yang positif (De Bosscher, Sotiriadou dan van Bottenburg, 2015). Pernyataan tersebut membangun pandangan bahwa raihan medali dan peringkat suatu negara dalam kancah internasional khususnya seperti gelaran olimpiade modern saat ini dianggap sebagai indikator keberhasilan suatu negara di level tertinggi olahraga. Selain raihan medali dan peringkat, banyaknya jumlah keikutsertaan atlet (baik olahraga individu maupun beregu) yang memenuhi syarat sehingga dapat mengambil bagian mewakili negara saat olimpiade atau kejuaraan tingkat internasional lainnya seperti kejuaraan dunia, juga dinilai sebagai salah satu indikator keberhasilan.

Politisi dan pembuat kebijakan sering berpendapat bahwa olahraga elit mempengaruhi identitas nasional, kebanggaan, pengakuan diplomatik, prestise internasional, faktor perasaan baik, peningkatan minat publik dalam olahraga dan peningkatan popularitas olahraga itu sendiri (Houlihan dan Green, 2008, Van Botternburg dkk., 2011, De Croock dkk., 2012). Pandangan tersebut menjadi implikasi bagi para politisi dan pembuat kebijakan di banyak negara agar melakukan upaya terbaik sehingga melahirkan kebijakan olahraga elit yang efektif dan efisien untuk mendorong prestasi yang lebih baik. Tentu membutuhkan atlet elit berbakat sebagai ujung tombak manakala target prestasi diharapkan semakin baik seiring berjalannya waktu.

Seiring dengan menariknya persaingan prestasi olahraga saat ini ditataran global seperti pada gelaran *olympic games* saat ini yang dimiliki IOC (*International Olympic Committee*) berdampak pada peran dan relevansi olahraga dalam masyarakat yang juga terus berkembang. Di tahun 2015 relevansi olahraga dalam masyarakat ini diakui oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) ketika olahraga dianggap sebagai bagian penting untuk mencapai agenda ambisius yaitu SDP, *Sustainable Development Goals* (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan). Hal ini yang kemudian menjadi momentum IOC memperkuat komitmen serta tekad untuk

menjadikan pembangunan keberlanjutan sebagai bagian integral dari semua kegiatan IOC.

IOC sebagai organisasi yang menyelenggarakan *olympic games* serta memimpin gerakan olimpiade meyakini bahwa olahraga memiliki peran yang penting dimasyarakat modern, IOC didedikasikan untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik melalui olahraga (International Olympic Committee, 2020). IOC tentu memiliki visi, nilai, misi dan prinsip kerja dalam gerakan olimpiade. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.1 Prinsip Kerja, Misi, Nilai, Visi Olimpiade
(International Olympic Committee, 2020)

Dengan prinsip kerja: Universalitas dan Solidaritas, Bersatu dalam perbedaan, Keberlanjutan Otonomi dan Tata Kelola yang Baik; Dengan misi: Memastikan Keunikan dan Perayaan Rutin Olimpiade, Menempatkan atlet di Jantung Gerakan Olimpiade, Mempromosikan Olahraga dan Nilai-Nilai Olimpiade di Masyarakat, dengan fokus pada kaum muda; Dengan nilai: *Excellence* (Keunggulan), *Respect* (Menghargai), *Friendship* (Persahabatan); Dengan visi: Membangun dunia yang lebih baik melalui olahraga; Sehingga Olympism adalah

filosofi hidup, yang menempatkan olahraga untuk melayani umat manusia (*International Olympic Committee*, 2020). Misi yang jelas dengan menempatkan atlet sebagai jantung dari gerakan olimpiade tentu membutuhkan proses yang sangat panjang juga atlet yang berbakat, sehingga atlet mampu memenuhi kualifikasi untuk bersaing di level olimpiade.

Van Botterbug (2009) menjelaskan bahwa bakat baik dalam olahraga, seni, ilmu pengetahuan atau usaha hidup lainnya adalah kualitas individu yang hanya dapat sepenuhnya diekspresikan dalam lingkungan sosial tertentu dan dengan dukungan orang lain. Penjelasan tersebut mendukung pemikiran bahwa bukan hanya bakat yang membuat seorang atlet meraih medali dan memenangkan pertandingan. Dibutuhkan tempat pelatihan seperti klub olahraga yang memberikan kesempatan berlatih dengan baik dan kompetisi untuk mengasah keterampilan mereka dengan bertambahnya jam terbang pengalaman bermain, tentu dengan adanya bimbingan dari pelatih terbaik yang kompeten, dukungan fisioterapis, dokter, ahli gizi dan ilmuwan olahraga dalam upaya meningkatkan performa mereka baik secara fisik maupun mental; dan tentu layanan ini harus didapatkan dari badan pengatur nasional, pemerintah, komite olimpiade dan mitra swasta untuk membuat olahraga menjadi karir pekerjaan yang lebih menarik (De Bosscher, Sotiriadou dan van Bottenburg, 2015).

Ketatnya persaingan antar negara dalam ajang olahraga internasional, membuka peluang dan mendorong kesempatan yang sama mencapai prestasi terbaik terlepas dari negara tersebut termasuk negara maju atau berkembang, memiliki populasi yang besar atau kecil, serta memiliki tingkat kesuksesan sosio-ekonomi yang tinggi ataupun rendah. Tetapi ada penjelasan lebih lanjut mengenai sejumlah studi empiris yang menunjukkan bahwa populasi dan kekayaan suatu negara adalah penentu kesuksesan sosio-ekonomi yang paling penting (Bernard dan Busse, 2004; De Bosscher, De Knop dan Heyndels, 2003a, 2003b; Johnson dan Ali, 2002). Dalam arti, secara intuitif besarnya populasi suatu negara menjadi faktor yang menentukan kesuksesan olahraga (De Bosscher, 2007).

Peluang capaian prestasi terbaik di semua cabang olahraga merupakan hal yang mustahil, karena semua negara mengerahkan kemampuan terbaik untuk mencapai podium tertinggi. Porter (1990) menyatakan bahwa tidak ada negara yang

bisa kompetitif dalam segala hal, tingkat daya saing yang tinggi di semua bidang sangat kecil kemungkinannya termasuk dalam perekonomian dan oleh karena itu negara-negara dapat berspesialisasi dalam satu domain. Serta adanya aturan pembatasan medali yang diperoleh satu negara berdasarkan pembatasan keikutsertaan atlet dalam satu nomor cabang olahraga, aturan ini dilakukan sebagai wujud agar memberikan peluang kepada setiap negara untuk turut berkompetisi. Sebagai contoh, di Olimpiade ada 15 cabang angkat besi yang memiliki total 45 medali yang tersedia untuk dimenangkan. Namun, negara-negara dibatasi untuk dapat memperebutkan maksimal 10 medali. Sedangkan dari segi olahraga ini dirancang untuk mencegah negara-negara tertentu menjadi terlalu dominan (De Bosscher, Veerle, Simon Shibli, Hans Westerbeek, 2015).

Pengakuan internasional, harga diri atas nama bangsa, semakin diyakini menjadi nilai penting yang berkaitan dengan prestasi olahraga elit suatu negara dikancah global. Beberapa negara bahkan terus meningkatkan investasi pada olahraga elit yang bertujuan untuk memastikan negara mereka berada dalam arena permainan yang seharusnya. Sejalan dengan hal tersebut, muncul sebuah istilah “*global sporting arms race*” dimana negara dan kepemimpinannya berpikir bahwa olahraga elit (semakin) penting dan keberhasilannya merupakan tujuan penting yang harus dicapai atas nama bangsa (De Bosscher, Veerle, Simon Shibli, Hans Westerbeek, 2015). Khususnya dalam persaingan di *olympic games* dimana media dan para politisi negara menjadikan tabel raihan medali sebagai acuan prestasi meskipun IOC memprotes bahwa tabel raihan medali bukanlah urutan prestasi (De Bosscher dkk., 2006). Akibat dari standar yang terus meningkat dalam olahraga internasional, maka terjadilah kompetisi antar ‘sistem (Heinila, 1982). Untuk mencari serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penentu keberhasilan suatu negara dalam persaingan olahraga elit, salah satu model konseptual yang dikembangkan yaitu SPLISS (*Sport Policy Leading into International Sporting Success*) oleh De Bosscher dkk., 2006 yang berawal saat dikembangkan di enam negara yaitu Belgia (Flanders dan Walonia), Belanda, Inggris, Italia, Kanada dan Norwegia diinisiasi.

Hasil penelitian SPLISS 1.0 yang dilakukan dengan membandingkan kebijakan olahraga elit di beberapa negara dan memberikan bukti lebih lanjut

bahwa faktor kebijakan yang mengarah pada kesuksesan olahraga elit mungkin berbeda di setiap olahraga (De Bosscher, Sotiriadou dan van Bottenburg, 2013). Green (2009) menunjukkan bahwa kebutuhan untuk kontrol dan koordinasi lebih menonjol di olahraga elit daripada di pengaturan olahraga lainnya. Sebagaimana sejalan dengan pendapat sebelumnya dari Clumpner (1994) dan Oakley dan Green (2001) bahwa pentingnya untuk memiliki sistem komunikasi nasional yang baik, distribusi yang jelas dan deskripsi peran dalam sistem, serta administrasi yang sederhana (efisien). Pendapat tersebut juga dikuatkan oleh Mintzberg (1994) yang menggambarkan pentingnya konsep untuk sentralisasi ketika tingkat spesialisasi yang tinggi dibutuhkan atlet (seperti dalam olahraga elit). Dengan membuat kebijakan yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan, diharapkan akan menghasilkan prestasi terbaik, meskipun pada akhirnya akan terjadi perbedaan capaian prestasi pada setiap masing-masing cabang olahraga dikarenakan perbedaan karakteristik satu dengan yang lain dan adanya aturan-aturan lainnya.

Secara khusus pembahasan mengenai peran kebijakan olahraga elit dan kebijakan nasional di kalangan ahli mulai menarik dan mengemuka terutama ketika berkaitan dengan prestasi di tingkat internasional. Secara lebih khusus telah dilakukan penelitian dengan membandingkan faktor kebijakan olahraga yang mengarah pada kesuksesan olahraga internasional dari 15 negara menggunakan analisis SPLISS 2.0. SPLISS adalah jaringan kerjasama penelitian yang bertujuan untuk mengoordinasikan, mengembangkan dan berbagi keahlian dalam penelitian kebijakan olahraga elit yang inovatif bekerja sama dengan pembuat kebijakan, Komite Olimpiade Nasional (NOC), organisasi internasional (olahraga) dan peneliti di seluruh dunia. SPLISS 2.0 merupakan evolusi dari proyek SPLISS 1.0 yang sudah disampaikan pada tahun 2008 dengan membandingkan kebijakan olahraga elit di enam negara yaitu Belgia (Flanders dan Wallonia), Belanda, Inggris, Italia, Kanada dan Norwegia (De Bosscher, Veerle, Simon Shibli, Hans Westerbeek, 2015). SPLISS 2.0 dibangun diatas model dan metodologi yang dikembangkan pada SPLISS 1.0 dengan melibatkan 15 negara, responden lebih dari 3.000 atlet, 1.300 pelatih dan 241 direktur kinerja yang memberikan wawasan lebih dalam tentang efektifitas kebijakan olahraga, serta dikembangkannya metode penilaian yang lebih komprehensif dalam rangka memperoleh wawasan yang lebih

dalam tentang hubungan antara kebijakan olahraga elit dan keberhasilan olahraga suatu negara.

Manakala dilihat dari kepentingannya, proses analisis hubungan antara kebijakan olahraga elit dan keberhasilan olahraga suatu negara dengan membandingkan prestasi antar negara yang satu dengan yang lainnya menggunakan SPLISS 2.0, prosesnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.2 Diagram Proses SPLISS

Dari gambar tersebut ada lima bagian, yang pertama yaitu *input* terdiri dari satu pilar yang menjelaskan mengenai dukungan finansial. Setelah *input* dilakukan maka terjadi *throughput* yang merupakan proses dan terdiri dari delapan pilar (dimulai dari pilar ke 2 – 9). Setelah melalui input dan proses, selanjutnya menghasilkan perbaikan iklim olahraga elit yang lebih lanjut menghasilkan *output* berupa prestasi. Dari keluaran data prestasi inilah kemudian menjadi hasil akhir dan untuk bahan penelitian masa depan. Tentu menjadi pijakan untuk perbaikan, apakah harus ada yang dievaluasi untuk diperbaiki dan diganti, atau mungkin dipertahankan dan ditambahkan.

Konteks sejarah, budaya dan politik suatu negara seringkali menjadi pembatas untuk perbaikan sistem olahraga elit di negara itu sendiri. Sebagaimana dikemukakan oleh Digel dkk., (2006) bahwa pengembangan olahraga performa tinggi ditandai dengan budaya lokal yang telah berkembang sejak lama dan dipengaruhi oleh politik dan sistem politik lokal. Artinya, kebijakan yang dibuat saat ini tidak terlepas dari kebijakan terdahulu yang telah dibuat ‘*path dependency*’ (Kay, 2005 hal. 553). Sebagai contoh, negara Indonesia melalui perspektif historis dalam praktik kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga tidak terlepas dari sejarah mengenai tiga era kepemimpinan nasional, yaitu orde lama (1945 - 1967), orde baru (1967 - 1998) dan orde reformasi (1998 - saat ini).

Akan tetapi, Ma'mun (2020) menjelaskan bahwa sejarah mungkin boleh menjadi pijakan awal, tetapi mengembalikan konsep berpikir tentang pembangunan olahraga termasuk dalam hal ini kebijakannya kedepan seperti masa silam tentu

bukan sesuatu yang direkomendasikan, karena sudah pasti berbeda baik secara kondisi, lingkungan serta tantangan yang dihadapinya. Namun demikian, sejarah memberikan kita kesempatan untuk menghadapi tantangan masa depan yang sudah pasti sangat berbeda kondisinya, terlebih negara-negara sudah memulai pergeseran paradigma dalam menilai fungsi dari olahraga yang semula pembangunan olahraga untuk tujuan olahraga itu sendiri, menjadi pembangunan olahraga untuk tujuan pembangunan masyarakat suatu bangsa dalam arti luas.

Membangun sistem olahraga elit yang memadai tentu diperlukan perhatian khusus, salah satu contoh sederhananya dengan memperhatikan kebutuhan setiap cabang olahraga, seperti apakah atlet pada cabang olahraga tersebut diharuskan spesialisasi lebih awal atau tidak, kemudian apakah olahraga tersebut bersifat individu atau olahraga tim, termasuk olahraga terukur atau permainan. Di Indonesia, olahraga prestasi adalah olahraga yang membina, mengembangkan dan meningkatkan potensi olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa (UU No. 11 Keolahragaan, 2022). Pembinaan dan pengembangan olahraga di Indonesia diatur dalam amanat undang-undang keolahragaan nomor 11 Tahun 2022. Secara sederhana, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilakukan melalui induk organisasi cabang olahraga di Indonesia.

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya mengenai peran IOC dalam gerakan olimpiade, terdapat tiga unsur bagian penting yaitu yang pertama IOC sebagai pemimpin gerakan olimpiade. Kemudian yang kedua *The National Olympic Committees* (NOCs) sebagai organisasi yang mengembangkan, mempromosikan dan melindungi gerakan olimpiade di negara masing-masing, di Indonesia yaitu KOI (Komite Olimpiade Indonesia). Dimana KOI berperan serta berfokus pada keikutsertaan Indonesia diajang internasional baik *single event* maupun *multi event*. Kemudian yang ketiga *The International Federations* (IFs) sebagai organisasi non-pemerintah internasional yang mengelola satu atau beberapa olahraga di tingkat dunia dan mencakup organisasi yang menyelenggarakan olahraga tersebut di tingkat nasional, di Indonesia yaitu IOCO (Induk Organisasi Cabang Olahraga) dibawah naungan KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) yang berperan

serta berfokus pada pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di level nasional.

Induk organisasi cabang olahraga, dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 Bab 1 mengenai Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 13 yang dimaksud dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga atau IOCO adalah organisasi yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan. Baik olahraga individu maupun beregu, dinaungi masing-masing IOCO serta memiliki kebijakan dalam sistem pembinaan dan pengembangannya, salah satu cabang olahraga yang aktif membina dan mengembangkan olahraga beregu yaitu olahraga permainan bola tangan. Olahraga bola tangan secara khusus dinaungi oleh ABTI (Asosiasi Bola Tangan Indonesia) dibawah naungan KONI sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa KONI yang berperan serta berfokus pada pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di level nasional. ABTI sebagai IOCO memiliki tanggungjawab dalam rangka membina dan mengembangkan olahraga bola tangan di Indonesia, dimulai dari skala internasional, nasional, provinsi hingga ke kabupaten/kota. Temuan yang seringkali ditemui terkait dengan kendala dan/atau permasalahan tata kelola IOCO di Indonesia yaitu konflik organisasi, program jangka pendek dan tidak futuristik, kejuaraan dan kompetisi masih *mismatch*, induk organisasi cabang olahraga yang jauh dari kaidah dan terbatasnya anggaran (Ma'mun, 2018, hlm. 137). Melihat dari kondisi tersebut, ABTI tentu memiliki peran sentral dan krusial dalam membangun sistem pembinaan dan pengembangan olahraga bola tangan di Indonesia, dengan memperhatikan aspek sumber daya sistem IOCO, tata kelola dan kebijakan organisasi yang dibuat, serta hasil prestasi yang didapatkan.

SPLISS 2.0 menyediakan pendekatan multidimensi untuk mengevaluasi kebijakan olahraga elit dimulai dari *input* (sumber daya sistem), *throughput* (proses) dan *output* (hasil prestasi) dengan melibatkan atlet, pelatih dan pengurus organisasi. Berdasarkan pemahaman tersebut, penelitian perlu dipersiapkan sedemikian rupa agar penulis memahami dengan baik mengenai topik sebelum memulai penelitian, sehingga diharapkan seluruh partisipan yang terlibat akan

berpartisipasi dengan efektif dan efisien. Hal ini menjadi penting karena berhubungan dengan rancangan penelitian dan analisis data yang akan disusun menggunakan *elite sport climate survey* dan *overall sport policy inventory*. Tahapan-tahapan penelitian dengan menggunakan model analisis SPLISS, antara lain, yaitu: pertama, penentuan kuesioner *elite sport climate survey* mewakili sembilan pilar SPLISS dengan 96 *critical success factor* menggunakan skala *likert* 5 poin yang diisi oleh atlet, pelatih dan ketua/pengurus dari keenam provinsi di Indonesia yang dijadikan sebagai sampel sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian, penyusunan draft wawancara terbuka semi-terstruktur berpedoman pada *overall sport policy inventory* yang juga mencakup sembilan pilar dengan 96 *critical success factor* dengan mewawancarai enam orang ketua/pengurus Asosiasi Bola Tangan Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Sumatera Barat. Untuk kemudian dilihat perbandingan diantara enam provinsi berdasarkan analisis SPLISS dengan memperhatikan *input* (sumber daya sistem), *throughput* (proses) dan *output* (hasil prestasi).

Dengan demikian, penulis akan melakukan penelitian analisis SPLISS dalam pembinaan dan pengembangan olahraga bola tangan berdasarkan pengamatan enam provinsi yaitu Pengprov ABTI DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Sumatera Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang penelitian, berikut pertanyaan penelitian ini:

- 1.2.1 Bagaimana sumber daya sistem (*input*) pilar 1: *financial support* (dukungan finansial) dan (*throughput*) pilar 2-9: (2) *governance, organisation dan structure of (elite) sport policies, an integrated approach to policy development* (tata kelola, organisasi dan struktur kebijakan olahraga (elit), (3) *foundation and participation* (fondasi dan partisipasi), (4) *talent identification and development system* (identifikasi bakat dan pengembangan sistem), (5) *post-career and athletic career support* (dukungan pasca karir dan karir atlet), (6) *training facilities* (fasilitas latihan), (7) *coaching provision and coach development* (pelatihan pelatih

dan pengembangan pelatih), (8) *(Inter)national competition* (kompetisi internasional dan nasional), (9) *scientific research* (penelitian ilmiah) dalam pembinaan dan pengembangan olahraga bola tangan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sasaran yang akan diwujudkan yaitu melakukan analisis SPLISS dalam pembinaan dan pengembangan olahraga bola tangan berdasarkan pengamatan enam provinsi. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, secara lebih rinci penelitian ini dimaksudkan:

1.3.1 Untuk mengetahui sumber daya sistem (*input*) pilar 1: *financial support* (dukungan finansial) dan proses (*throughput*) pilar 2-9: (2) *governance, organisation dan structure of (elite) sport policies, an integrated approach to policy development* (tata kelola, organisasi dan struktur kebijakan olahraga (elit), (3) *foundation dan participation* (fondasi dan partisipasi), (4) *talent identification dan development system* (identifikasi bakat dan pengembangan sistem), (5) *post-career dan athletic career support* (dukungan pasca karir dan karir atlet), (6) *training facilities* (fasilitas latihan), (7) *coaching provision dan coach development* (pelatihan pelatih dan pengembangan pelatih), (8) *(Inter)national competition* (kompetisi internasional dan nasional), (9) *scientific research* (penelitian ilmiah) dalam pembinaan dan pengembangan olahraga bola tangan di Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Barat.

1.4 Manfaat / Signifikansi Penelitian

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan yang positif serta dapat digunakan oleh berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih baik secara teori maupun praktis.

1.4.1 Secara teori

Untuk menambah referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya, khususnya dalam pembinaan dan pengembangan olahraga

bola tangan. Serta memberikan sumbangan keilmuan bagi para praktisi olahraga bolatangan, baik atlet, pelatih dan pengurus organisasi.

1.4.2 Secara praktis

Dapat memberikan kontribusi penelitian bagi pengurus organisasi atau pihak-pihak terkait, untuk dijadikan salah satu karya ilmiah dalam pembahasan mengenai pembinaan olahraga bola tangan.

1.4.2.1 Atlet

Manfaat tambahan pengetahuan bagi atlet, mengenai analisis SPLISS dalam pembinaan dan pengembangan olahraga bola tangan di enam provinsi Indonesia.

1.4.2.2 Pelatih

Menjadi tambahan pengetahuan bagi pelatih, mengenai analisis SPLISS dalam pembinaan dan pengembangan olahraga bola tangan di enam provinsi Indonesia.

1.4.2.3 Pengurus Organisasi

Menjadi bahan masukan bagi pengurus organisasi, mengenai analisis SPLISS dalam pembinaan dan pengembangan olahraga bola tangan di enam provinsi Indonesia.

1.4.2.4 Peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini bisa dijadikan bahan pijakan untuk menganalisis lebih dalam lagi mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga bola tangan di Indonesia.

1.5 Struktur organisasi tesis

Struktur organisasi tesis berisi rincian tentang urutan penulisan dari setiap bab, mulai dari bab I hingga bab V, yaitu sebagai berikut:

1.5.1 Bab I: Berisi tentang uraian pendahuluan dan merupakan bagian awal tesis yang terdiri atas: latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, struktur organisasi tesis.

1.5.2 Bab II: Berisi tentang uraian kajian pustaka atau landasan teoritis. Kajian pustaka mempunyai peran yang sangat penting, berfungsi sebagai landasan teoritik dalam menyusun pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian, terdiri atas: pembahasan teori-teori, konsep-konsep, dalil-dalil-, hukum-hukum,

model-model, rumus-rumus utama serta turunannya dalam bidang yang dikaji; penelitian yang relevan; kerangka pemikiran.

1.5.3 Bab III: Berisi penjabaran yang rinci tentang metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang terdiri atas, desain penelitian, partisipan, populasi dan sampel, instrumen penelitian, prosedur penelitian dan analisis data.

1.5.4 Bab IV: Berisi tentang dua hal yang utama yaitu temuan dan pembahasan, terdiri atas: temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data; pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

1.5.5 Bab V: Menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian, terdiri atas: simpulan, implikasi dan; rekomendasi.